

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KE PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Andi Ilham Jaya<sup>1)</sup> dan Ruliaty<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar  
email: akuntansi\_polman@yahoo.com

<sup>2)</sup>Magister Manajemen Unismuh Makassar  
email : ruliaty.umm@gmail.com

## Abstract

*This study aims to analyze and know 1) human resource education factors affect the timeliness of financial statements delivery, 2) training factors affect the timeliness of financial statements delivery, 3) information technology utilization factors affect the timeliness of financial statements delivery, and 4) regulatory understanding factors affect the timeliness of the delivery of SKPD financial statements to PPKD Polewali Mandar Regency. The data used in this study were primary data obtained from questionnaires. The population of 47 SKPD, and based on purposive sampling with sample criteria taken in this study are employees who carry out financial management including the Head of Office / Agency / Office ranging from the Office of Financial Administration (PPK), Technical Implementation Officer of Activities (PPTK), Treasurer of Expenditure and Assistant Treasurer. The data obtained is processed using multiple linear regression analysis. The results of this study show that: 1) Education has a significant effect on the timeliness of the delivery of financial statements. 2) Training has no significant effect on the timeliness of financial statements. 3) The utilization of information technology has no significant effect on the timeliness of the delivery of financial statements and 4) Understanding of regulations has no significant effect on the timeliness of the submission of financial statements from SKPD to PPKD Polewali Mandar Regency.*

**Keywords:** *Timeliness, Financial Statements, and Financial Management*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 1) faktor pendidikan sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan, 2) faktor pelatihan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan, 3) faktor pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan, dan 4) faktor pemahaman peraturan berpengaruh terhadap ketepatanwaktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah populasi 47 SKPD, dan berdasarkan purposive sampling dengan kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk Kepala Dinas/Badan/Kantor mulai dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 2) Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 3) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan 4) Pemahaman peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar.

**Kata Kunci :** Ketepatanwaktu, Laporan Keuangan, dan Pengelola Keuangan

## 1. PENDAHULUAN

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran disusun berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD berupa Laporan Keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Pelaporan APBD tahunan anggaran ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan pasal 391 dan 394. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal penyampaian informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali. Dalam Penyajian laporan keuangan daerah yang disusun oleh pemerintah.

Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan. Dampak dari ketidaktepatan waktu mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas, meskipun tidak salah.

Selanjutnya, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tingkat satuan kerja (SKPD) berhubungan dengan beberapa faktor, baik dalam proses penyusunan hingga menyampaikannya. Faktor-faktor tersebut antara lain latar belakang pendidikan, pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman peraturan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **a. Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umum bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

#### **1) Pengertian Laporan Keuangan**

Indra (2007: 63) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.

Menurut Munawir (2010:31) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Laporan Keuangan menurut Mardiasmo (2002:4) yaitu: Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

## 2) Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009:163) secara tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintahan adalah:

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta
- e) untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
- f) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

## 3) Jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan
- 4) Pengguna Laporan Keuangan

Mardiasmo (2009: 171) memakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a) Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab
- b) Legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat
- c) Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman
- 5) Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan bahwa pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
- b) Undang-Undang di bidang Keuangan Negara
- c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur Keuangan Daerah
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

## **b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan,

yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah :

- a) Opini wajar tanpa pengecualian ( *Unqualified Opini* )
- b) Opini wajar dengan pengecualian ( *Qualified Opinion* )
- c) Opini tidak wajar ( *Adversed Opinion* )
- d) Pernyataan menolak memberikan opini ( *Disclaimer of Opinion* )

### **c. Komponen Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda)**

Menurut Rini (2012:81) bahwa Laporan Keuangan Pemda merupakan, Laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan Laporan Keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan Keuangan Pemda Ini dibuat setiap semesteran/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD.

#### **1) Pelaporan APBD Oleh SKPD**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran, yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD tersebut terdiri dari; laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa, pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2) Faktor-Faktor yang memengaruhi Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu kegunaan laporan keuangan berkurang, bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi atau kerumitan dalam menjalankan suatu tugas suatu entitas pelaporan, bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Kompleksitas operasi tersebut seperti kompetensi sumber daya manusia terkait dengan pendidikan yang dimiliki dan pelatihan yang pernah diikuti, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman peraturan yang

berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Dapat diketahui bahwa penyebab keterlambatan atau ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut adalah faktor sumber daya manusia.

### 3) Pendidikan dan Pelatihan

Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9 menyatakan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

### 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2007:6) teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis (TI) yang mengelola komponen-komponennya berupa hardware, software, netware, dataware, dan brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Teknologi informasi dapat disimpulkan sebagai hardware, software, netware, dataware, brainware, dan teknologi pemrosesan informasi lainnya untuk mendukung sistem informasi.

### 5) Pemahaman Peraturan

Pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Terkait dengan pemahaman terhadap peraturan, masing-masing tenaga pengelola keuangan daerah harus menguasai apa yang harus dilakukan dan disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semakin baik pemahaman responden pengelola keuangan daerah, semakin mudah responden tersebut mengelola keuangan daerah sehingga semakin tepat dan cepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

## 3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2014; 4).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Dari jenis masalah yang ingin dikaji, penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Dimana penelitian korelasi, menurut Arikunto, adalah penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Arikunto, 2006 : 37).

### a. Analisis Statistik Deskriptif

Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dibentuk dalam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2014: 92).

### b. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012: 160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

#### 2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012: 105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $> 0,01$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ .

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode – t dengan kesalahan pengganggu pada periode t -1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji durbin Watson dengan membandingkan nilai durbin Watson hitung (d) dengan nilai durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $0 < d < dL$ , maka terjadi autokorelasi positif.
- b) Jika  $dL < d < du$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
- c) Jika  $d - dL < d < 4 - dL$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
- d) Jika  $4 - du < d < 4 - dL$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
- e) Jika  $du < d < 4 - du$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negative

**c. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh pendidikan, pelatihan, ketersediaan fasilitas dan pemahaman peraturan terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

a = Bilangan konstanta

X1 = Pendidikan

X2 = Pelatihan

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X4 = Pemahaman Peraturan

b1,b2,b3,b4 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hasil penelitian akan dijelaskan mengenai deskripsi data, gambaran umum responden, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta hasil uji hipotesis.

**a. Deskripsi Data atas Variabel Penelitian**

Analisis data deskriptif ini bertujuan mengetahui gambaran deskriptif mengenai jawaban responden dalam penelitian ini. Terutama mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi yang menggambarkan jawaban responden atas item-item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner.

Distribusi frekuensi diperoleh dari hasil tabulasi skor jawaban responden. Adapun dasar interpretasi skor item dalam variabel penelitian adalah sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**

Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian

No.	Nilai Skor	Interpretasi
1	$0 < NS \leq 1$	Berada pada daerah sangat negatif
2	$1 < NS \leq 2$	Berada pada daerah negatif
3	$2 < NS \leq 3$	Berada pada daerah tengah-tengah
4	$3 < NS \leq 4$	Berada pada daerah positif
5	$4 < NS \leq 5$	Berada pada daerah sangat positif

Sumber: Husain Umar (2011; 130)

Uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

1) Deskriptif variabel Pendidikan

Pendidikan merupakan pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden atau perangkat SKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dimana setelah memiliki pendidikan tersebut mereka dapat menyelesaikan pekerjaan pengelolaan keuangan dengan baik. Variabel ini diukur melalui 8 indikator.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang diteliti secara umum persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pendidikan (X1) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,65 dan hal ini dinyatakan baik. Untuk indikator tingkat pendidikan yang dimiliki sangat sesuai dengan bidang tugas sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik diperoleh rata-rata jawaban responden 3,49. Indikator tingkat pendidikan yang dimiliki membuat pegawai mampu menyelesaikan kesulitan yang di hadapi diperoleh rata-rata jawaban responden 3,60, untuk indikator pendidikan yang dimiliki dapat membantu menambah pengetahuan tentang laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 4,55, selanjutnya indikator pendidikan yang dimiliki dapat menjamin dalam menyelesaikan masalah terkait pelaporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,47; indikator pendidikan yang dimiliki, mengajarkan bagaimana menangani laporan keuangan dengan benar diperoleh rata-rata jawaban responden 3,06; indikator pendidikan yang dimiliki bermanfaat untuk menangani laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 4,02; indikator pendidikan yang dimiliki bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu diperoleh rata-rata jawaban responden 3,55 dan indikator terakhir pegawai percaya, bisa menangani laporan keuangan dengan cepat karena pendidikan yang mereka miliki diperoleh rata-rata jawaban responden 3,43. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan di SKPD Kabupaten Polewali Mandar sudah memadai sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

2) Deskriptif variabel Pelatihan

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang diteliti secara umum persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pelatihan (X2) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,83 dan hal ini dinyatakan baik. Untuk indikator jenis pelatihan yang diikuti sudah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,55, selanjutnya untuk indikator pelatihan yang pernah diikuti dapat menambah pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,09; untuk indikator pelatihan yang pernah diikuti dapat meningkatkan keterampilan bagi diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan pengelolaan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 4,02; untuk indikator setelah mengikuti pelatihan, pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan dengan semakin bertambah baik dan cepat diperoleh rata-rata jawaban responden 4,64; indikator pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan sangat berguna dalam mempercepat penyampaian laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,47; indikator pegawai selalu mengajarkan kepada rekan sekerja tentang pengetahuan atau metode baru yang diperoleh dari mengikuti pelatihan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,74; indikator setelah mengikuti pelatihan, pegawai merasa lebih percaya diri dalam penyelesaian pekerjaan dibanding sebelum mengikuti pelatihan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,64 dan inidikator terakhir pelatihan yang pernah diikuti menambah rasa tanggungjawab terhadap hasil kerja atau prestasi diperoleh rata-rata jawaban responden 4,45. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatoihan yang diikuti sudah sesuai sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya.

3) Deskriptif variabel pemanfaatan teknologi informasi

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang diteliti secara umum persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,75 dan hal ini dinyatakan baik. Untuk indikator setiap Subbagian pada SKPD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas diperoleh rata-rata jawaban responden 3,60, selanjutnya indikator jaringan internet telah terpasang di seluruh unit kerja diperoleh rata-rata jawaban responden 3,57; untuk indikator jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh rata-rata jawaban responden 4,09; indikator proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi diperoleh rata-rata jawaban responden 3,30; indikator pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,83; untuk indicator laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi diperoleh rata-rata jawaban responden 4,21; indicator adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur diperoleh rata-rata jawaban responden 4,13; dan indicator peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya diperoleh rata-rata jawaban responden 3,26. Hasil ini menunjukkan bahwa semua SKPD di Kabupaten Polewali Mandar sudah menggunakan internet dan software khusus yang sesuai undang-undang dalam pembuatan laporan keuangannya.

#### 4) Deskriptif variabel Pemahaman Peraturan

Pemahaman Peraturan merupakan sejauh mana pemahaman responden sebagai pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD yaitu Permendagri no 13 tahun 2006, Permendagri no 59 tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel pemahaman peraturan ini diukur melalui 5 indikator dengan 5 item pertanyaan.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang diteliti secara umum persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pemahaman peraturan (X4) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,72 dan hal ini dinyatakan baik. Untuk indicator sebagai pelaku pengelola keuangan daerah sangat memahami Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,26, selanjutnya untuk indicator sebagai pelaku pengelola keuangan daerah sangat memahami Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,81; indicator sebagai pelaku pengelola keuangan daerah sangat memahami Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,38; indicator sebagai pengelola keuangan daerah sangat mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai pengelola diperoleh rata-rata jawaban responden 3,60 dan indicator sebagai pengelola keuangan daerah sangat mengetahui dan memahami mengenai sanksi pengelola keuangan daerah diperoleh rata-rata jawaban responden 4,55. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai pengelola keuangan daerah sangat memahami peraturan dalam membuat laporan keuangan SKPD.

#### 5) Deskriptif variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan merupakan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Apabila informasi disampaikan dalam waktu lama maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini diukur melalui 4 indikator. Pada tabel berikut ini akan dikemukakan hasil penilaian responden.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang diteliti secara umum persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,53 dan hal ini dinyatakan baik. Untuk indicator informasi yang dibutuhkan selalu tersedia ketika diminta diperoleh rata-rata jawaban responden 3,47; untuk indicator laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan diperoleh rata-rata jawaban responden 3,06; indicator laporan keuangan telah selesai dan disampaikan tepat setelah tahun anggaran berakhir diperoleh rata-rata jawaban responden 4,02 dan indicator laporan keuangan telah diserahkan paling lambat atau maksimal 2 bulan setelah anggaran berakhir diperoleh rata-rata jawaban responden 3,55, hasil ini menunjukkan bahwa penyajian informasi oleh masing-masing SKPD sudah sesuai dengan frekuensi informasi pelaporan.

### **b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data**

#### 1) Uji Validitas

Cara menguji validitas dengan menggunakan formula *Product Moment* dengan taraf signifikansi 0,05. Jika  $r_{xy} > \text{tabel}$  maka data tersebut adalah valid, tetapi jika  $r_{xy} < \text{tabel}$  maka data tidak valid. Validitas dapat juga diketahui dari signifikansi hasil korelasi, jika signifikansi hasil korelasi lebih kecil 0,05, maka uji tersebut merupakan konstruk yang kuat. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, maka hasil pengujian validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:



**Tabel 2**  
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	r	sig.	Keterangan	Reliabilitas	Keterangan
Pendidikan (X1)	X1.1	0,645	0,000	Valid	0,645	Reliabel
	X1.2	0,263	0,074	Tidak Valid		
	X1.3	0,306	0,037	Valid		
	X1.4	0,837	0,000	Valid		
	X1.5	0,837	0,000	Valid		
	X1.6	0,517	0,000	Valid		
	X1.7	0,837	0,000	Valid		
	X1.8	0,288	0,050	Valid		
Pelatihan (X2)	X2.1	0,275	0,062	Tidak Valid	0,658	Reliable
	X2.2	0,535	0,000	Valid		
	X2.3	0,555	0,000	Valid		
	X2.4	0,522	0,000	Valid		
	X2.5	0,511	0,000	Valid		
	X2.6	0,561	0,000	Valid		
	X2.7	0,507	0,000	Valid		
	X2.8	0,665	0,000	Valid		
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	X3.1	0,464	0,001	Valid	0,687	Reliabel
	X3.2	0,732	0,000	Valid		
	X3.3	0,600	0,000	Valid		
	X3.4	0,682	0,000	Valid		
	X3.5	0,730	0,000	Valid		
	X3.6	0,544	0,000	Valid		
	X3.7	0,717	0,000	Valid		
	X3.8	0,680	0,000	Valid		
Pemahaman Peraturan (X4)	X4.1	0,687	0,000	Valid	0,672	Reliable
	X4.2	0,732	0,000	Valid		
	X4.3	0,500	0,000	Valid		
	X4.4	0,313	0,032	Valid		
	X4.5	0,445	0,002	Valid		
Ketepatan Waktu (Y)	Y1.1	0,661	0,000	Valid	0,662	Reliable
	Y1.2	0,862	0,000	Valid		
	Y1.3	0,369	0,000	Valid		
	Y1.4	0,862	0,000	Valid		

Sumber : lampiran 2 hasil uji validitas dan reliabilitas.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa instrumen penelitian untuk semua subdimensi dan variabel bersifat valid, kecuali X1.2 dan X2.1 sehingga kedua instrumen tersebut tidak diikuti pada pengujian selanjutnya.

#### 2) Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur baru dapat dipercaya dan diandalkan bila selalu didapatkan hasil yang konsisten dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Untuk melakukan uji reliabilitas dapat dipergunakan teknik *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

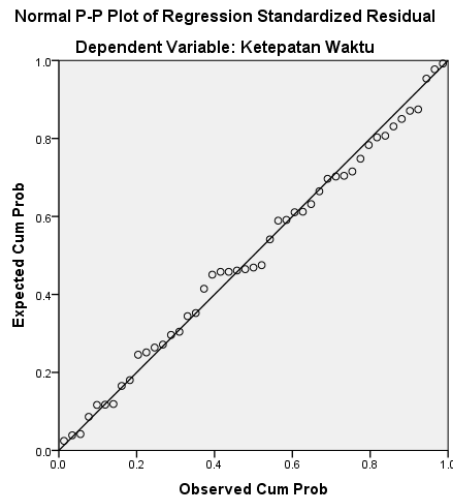
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian, seperti yang ada pada Tabel 2, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian ini mempunyai koefisien keandalan/alpha lebih besar dari 0,6. Bila hasil uji reliabilitas ini dikaitkan dengan kriteria indeks koefisien reliabilitas menurut Arikunto (2006), menunjukkan bahwa keandalan/alpha instrumen penelitian adalah tinggi. Dengan demikian data penelitian bersifat reliabel dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

### c. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal,

maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik, sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik (Siregar, 2014: 153). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Gambar berikut menyajikan hasil uji normalitas berupa plotnya.



Gambar 2. Uji Normalitas Probability Plot  
 Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik residual model regresi sudah berdistribusi normal karena titik-titik tersebut yang menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian syarat kenormalan sebagai pengujian statistik menggunakan regresi dapat terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk dapat menentukan apakah terdapat multikolinieritas dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan tolerance serta menganalisis matrix korelasi variabel-variabel bebas. Adapun nilai VIF dapat dilihat pada penyajian Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3

Pengujian Multikolinieritas Coefficients <sup>a</sup>						
		Correlations			Collinearity Statistics	
Model		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Pendidikan	.631	.473	.409	.537	1.861
	Pelatihan	.474	.173	.134	.487	2.054
	Pemanfaatan TI	.383	-.017	-.013	.383	2.613
	Pemahaman	.428	-.031	-.024	.347	2.881
	Peraturan					

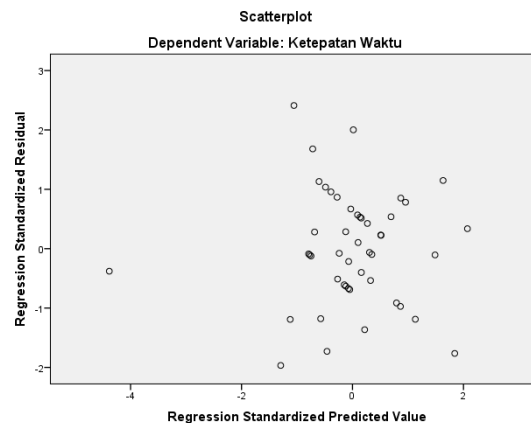
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu

Hasil pengujian dalam tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup kecil, dimana semuanya berada dibawah 10 dan nilai tolerance semua variabel berada diatas 0,10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, yang berarti semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda, disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik heterokedastisitas antara lain prediksi variabel dependen dengan variabel independen. Hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan program pengolah data SPSS 23.0 for Windows dapat dilihat pada grafik yang disajikan berikut ini.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Grafik  
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak terjadi heterokedastisitas.

#### B. Hasil Uji Regresi Berganda

- a) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan Keuangan. Untuk menganalisis hipotesis tersebut, responden memberi tanggapan pada pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner yang terdiri dari variabel pendidikan (X1) dengan 8 item pertanyaan, dan ketepatan waktu dengan 4 item pertanyaan Setelah dilakukan analisis *regresi linier* berganda, diperoleh nilai  $p = 0,001$  (nilai  $p < 0,005$ ), hasil ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X1) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Artinya hipotesis pertama ini diterima.
- b) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Untuk menganalisis hipotesis tersebut, responden memberi tanggapan pada pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner yang terdiri dari variabel pelatihan (X2) dengan 8 item pertanyaan, dan ketepatan waktu dengan 4 item pertanyaan Setelah dilakukan analisis *regresi linier* berganda diperoleh nilai  $p = 0,262$  (nilai  $p > 0,005$ ), hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Artinya hipotesis kedua ditolak.
- c) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Untuk menganalisis hipotesis tersebut, responden memberi tanggapan pada pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner yang terdiri dari variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) dengan 8 item pertanyaan, dan ketepatan waktu dengan 4 item pertanyaan Setelah dilakukan analisis *regresi linier* berganda diperoleh nilai  $p = 0,912$  (nilai  $p > 0,005$ ), hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Artinya hipotesis ketiga ditolak.
- d) Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah variabel pemahaman peraturan (X4) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Untuk menganalisis hipotesis tersebut, responden memberi tanggapan pada pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner yang terdiri dari variabel pemahaman peraturan (X4) dengan 5 item pertanyaan, dan ketepatan waktu dengan 4 item pertanyaan Setelah dilakukan analisis *regresi linier* berganda diperoleh nilai  $p = 0,842$  (nilai

$p > 0,005$ ), hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan (X4) berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu (Y). Artinya hipotesis keempat ditolak.

#### **d. Pembahasan Penelitian**

##### 1) Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ternyata hipotesis 1 diterima, dari nilai perhitungan pada table uji t dapat dilihat bahwa pengaruh pendidikan terhadap ketepatan waktu adalah positif signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan variabel pendidikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar secara langsung sebesar 0,779. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh pegawai SKPD membuat penyampaian laporan keuangan ke PPKD tepat waktu.

Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudianta & Erawati (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian, Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa factor tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

##### 2) Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ternyata hipotesis 2 ditolak, dari nilai perhitungan pada table uji t dapat dilihat bahwa pengaruh pelatihan terhadap ketepatan waktu adalah positif tidak signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan variabel pelatihan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar secara langsung sebesar 0,250. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Pengaruh positif ini berarti bahwa semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh pengelola keuangan maka semakin tepat waktu penyampaian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Polewali Mandar cukup mendapatkan pelatihan dan untuk menunjang kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Hasil ini di tunjukkan dari persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pelatihan (X2) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,83 dan hal ini dinyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diikuti sudah sesuai sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Penelitian ini sejalan dengan Darwanis dan Mahyani (2009) dengan pelatihan yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu penyelesaian tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. dimana semua hal tersebut akan mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.

##### 3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ternyata hipotesis 3 ditolak, dari nilai perhitungan pada table uji t dapat dilihat bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar adalah negatif tidak signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar secara langsung sebesar -0,021. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pengaruh negatif ini berarti bahwa semakin banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian laporan keuangan maka semakin tidak tepat waktu penyampaiannya.

Berdasarkan persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,75 dan hal ini dinyatakan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa semua SKPD di Kabupaten Polewali Mandar

sudah menggunakan internet dan software khusus yang sesuai undang-undang dalam pembuatan laporan keuangannya, namun hal tersebut tidak membuat penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan beberapa penelitian atau pendapat beberapa peneliti terdahulu. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif..

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4) Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ternyata hipotesis 4 ditolak, dari nilai perhitungan pada table uji t dapat dilihat bahwa pengaruh pemahaman peraturan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar adalah negatif tidak signifikan. Pengaruh yang ditimbulkan variabel pemahaman peraturan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar secara langsung sebesar -0,049. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pengaruh negatif ini berarti bahwa semakin paham pegawai pengelola laporan keuangan terhadap peraturan maka semakin tidak tepat waktu penyampaiannya.

Berdasarkan persepsi pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap variabel pemahaman peraturan (X4) berada pada daerah positif dengan rata-rata skor 3,72 dan hal ini dinyatakan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa semua pegawai di SKPD Kabupaten Polewali Mandar sudah memahami peraturan-peraturan dalam pembuatan laporan keuangannya, namun hal tersebut tidak membuat penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Elvi Soeprihatiningsih (2017) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa pelatihan, ketersediaan fasilitas, dan pemahaman peraturan memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPD, sedangkan latar belakang pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Pemahaman peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana responden sebagai pelaku pengelola keuangan daerah dalam memahami peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 5. KESIMPULAN

1. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh pegawai SKPD membuat penyampaian laporan keuangan ke PPKD tepat waktu.
2. Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai SKPD tidak membuat penyampaian laporan keuangan ke PPKD tepat waktu.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai SKPD tidak membuat penyampaian laporan keuangan ke PPKD tepat waktu.

4. Pemahaman peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dari SKPD ke PPKD Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai pengelola keuangan memahami peraturan namun bukan hal tersebut yang membuat penyampaian laporan keuangan ke PPKD tepat waktu.

## 6. REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta.
- Bastian, Indra. 2007 (a), *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlanga, Jakarta.
- Desmiyawati. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). *Jurnal Akuntansi FE-Universitas RIAU*, Vol. 2, No. 2, (ISSN 2337-4314).
- Ghozali, Imam, 2012, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi 5, Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, Semarang.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo .2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir), *Simposium Nasional Akuntansi XI.23-24 Juli*. Pontianak
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
- Rini, R., & Sarah, A. 2014. Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten serta kaitannya dengan korupsi di Indonesia. *Etikonomi*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tontiset, N. (2018). The effect of executive management support and cost accountant competency on CMS design effectiveness and its consequence: An empirical research of manufacturing business in Thailand. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 14(2), 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Yudianta, Erawati, 2012, Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.